KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM MERESPON PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH

*BANYUWANGI DISTRICT GOVERNMENT POLICIES IN RESPONDING TO THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS IMPACT ON REGIONAL TAX RECEIVING*

Galih Wicaksono1\*, Yeni Puspita2, Venantya Asmandani3, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum4

1,2,3,4 Prodi Perpajakan, FISIP, Universitas Jember, Jember, Jawa Timur

\*Koresponden email: galih.fisip@unej.ac.id

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber utama bagi penerimaan daerah yang digunakan dalam pembangunan. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meringankan beban masyarakat dan bersifat sebagai stimulus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi Pandemi Covid-19, serta dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan pajak daerah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan diperkaya kajian literatur serta data yang diperoleh dari pihak ketiga. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dengan adanya berbagai kebijakan pajak daerah yang telah dikeluarkan di masa Pandemi Covid-19, maka berdampak pada stabilnya penerimaan pajak daerah yang berasal dari sektor pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang berasal dari sektor pariwisata melebihi target yang ditetapkan, meskipun secara umum penerimaan pajak daerah tidak dapat optimal sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hendaknya selalu cermat dan tepat dalam penentuan target penerimaan pajak daerah, serta disesuaaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

**Kata kunci**: Kebijakan Pajak Daerah; Pandemi Covid-19; Penerimaan Pajak

*ABSTRACT*

Taxes are one of the main sources of regional revenue used in development. However, with the Covid-19 pandemic, the Banyuwangi Regency Government issued various policies to ease the burden on the community and act as a stimulus. This study aims to determine the policies of the Banyuwangi Regency Government in dealing with the Covid-19 Pandemic, as well as the impact of these policies on local tax revenues. This type of research is descriptive qualitative with enriched literature review and data obtained from third parties. This study resulted in the finding that with the various regional tax policies that have been issued during the Covid-19 pandemic, they have an impact on the stability of local tax revenues from the tourism sector. This is evidenced by the realization of local tax revenues from the tourism sector exceeding the set targets, although in general local tax revenues cannot be optimal as they should be. Therefore, the Banyuwangi Regency Government should always be careful and precise in determining local tax revenue targets, as well as adjusted to the socio-economic conditions of the community.

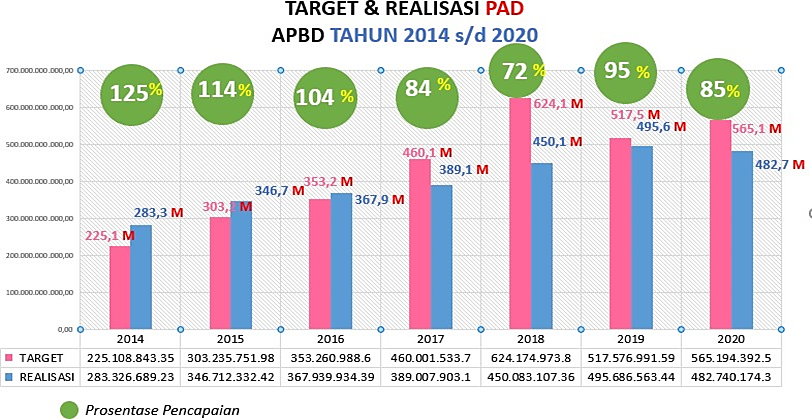
**Keywords**: Local Tax Policy; Covid-19 pandemic; Tax revenue

# PENDAHULUAN

Dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 Covid 19 masuk ke Indonesia, lebih tepatnya di Jawa Barat, kemudian terus bertambah jumlah pasien Covid 19 dengan begitu cepat dan diikuti lonjakan kasus di beberpa daerah di Indonesia. Pemerintah merespon dengan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak penyebaran COVID 19 semakin meluas, kerugian yang dihadapi oleh dampak pandemic COVID 19 dirasakan hampir di semua sektor perekonomian, dengan semua dampak yang muncul, maka Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan perekonomian nasional, dengan mengalokasikan anggaran belanja pada sektor kesehatan, jarring pengamanan sosial (*Social Safety*), serta pemulihan ekonomi para pelaku usaha dan masyarakat terdampak Covid 19, maka hal inilah yang akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai paying hukum dan menjadi UU No 2 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19).

Upaya penanggulangan pandemic Covid 19 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan berpedoman pada kebijakan dari pusat juga berupaya menanggulangi dampak dari Covid 19 dengan kebijakan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kabupaten Banyuwangi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa merupakan daerah yang strategis, sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Bali (Wicaksono dan Puspita, 2020) dengan beragam potensi yang dimiliki dan pertumbuhan ekonomi yang selalu positif juga merasakan dampak dari Pandemi Covid 19 pada perekonomian, berdasarkan rilis BPS Kabupaten Banyuwangi, dampak covid 19 pada perekonomian Kabupaten Banyuwangi mengalami kontraksi sebesar 3,58%, dan paling dalam jika dibandingkan dengan kabupaten di wilayah tapal kuda, Kabupaten Jember, tumbuh minus 2,98%, Kabupaten Situbondo minus 2,33% dan yang terendah Kabupaten Bondowoso minus 1,36%. Hal ini direspon oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati No 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Kondisi Pandemi Covid 19, yang bertujuan untuk membuka tatanan kehidupan baru, meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan serta meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tatanan normal baru.

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi juga diakibatkan realisasi PAD yang belum optimal, PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (Halim, 2004) dimana pada tahun 2020 realisasi PAD hanya mencapai 85,5% dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar Rp 565 Milyar, seperti diuraikan pada ganmbar 1.1 berikut dimana terlihat pada tahun 2014 sampai dengan 2016 Realisasi melebihi Target yang ingin dicapai kemudian mengalami penuruan pada tahun setelahnya smapai pada tahun 2020, dimana pada maret 2020 realisasi mencapai 85,5%. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penyumbang PAD Kabupaten Banyuwangi, dimana terdapat 9 jenis pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam Perda Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet. Pajak daerah Menurut Suandy (2011) adalah Kontribusi wajib oleh orang Pribadi atau Badan yang wewenang pemungutannya adalah pada Pemerintah Daerah.



Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan PAD

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Asmandani dkk (2020) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar. Pajak Daerah memiliki arti penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PAD, secara umum ada dua cara dalam yaitu dengan cara ekstensifikasi dan ekstensifikasi, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Jannah, dkk (2016) dimana pemerintah Kabupaten Mojokerjo memanfaatkan peran serta wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang arti pentingnya pajak daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD. Kabupaten Banyuwangi dengan beberapa destinasi Wisata yang menarik minat wisatawan baik domesik maupun Internasional. Destinasi alam dengan pantai dan perkebunan serta destinasi budaya dengan beragam festival yang dimiliki, hal ini berdampak pada kunjungan wisatawan yang datang (Puspita dan Wicaksono, 2020). Keberadaan destinasi wisata tentunya berdampak pada penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi, namun pada masa Pandemi Covid 19 dimana sektor pariwisata mengalami keterpurukan sehingga hal ini juga dialami oleh sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, dengan menutup tempat pariwisata dan pembatasan kunjungan sangat dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha wisata.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 188/123/KEP/429.011/2020 tentang penghapusan denda administrasi pajak daerah menjadi angin segar bagi wajib pajak terdampak Covid 19, dimana upaya ini dilakukan bertujuan untuk meringankan kewajiban perpajakan dengan penghapusan denda administrasi, di satu sisi juga upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengotimalkan penerimaan Pajak Daerah. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Pradiska (2021) menguraikan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait pemungutan PBB P2 yang tersurat dalam Surat Edaran Bupati No.900/064.2/2020 adalah strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PBB P2. Pada masa Pandemi COVID-19 Hal tersebut terbukti dari pengukuran rasio efektivitas penerimaan PBB P2 yang sangat tinggi dan melebihi target yaitu sebesar 117% pada akhir tahun 2020.

**METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan menjelaskan keterkaitan antara berbagai kebijakan pajak daerah dengan target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang berasal dari berbagai sektor. Data diperoleh dari pihak ketiga dengan diperkuat melalui studi literatur berbagai peraturan dan undang-undang, serta wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ditetapkan bahwa pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi dipungut dan dikumpulkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bapenda Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain perencanaan dan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah, pelaksanaan administrasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah. Boedijono dkk (2019) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur pengelolaan keuangan, baik dari tingkat pusat maupun sampai dengan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Susilo dkk (2018) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah ujung tombak dalam pelayanan, dimana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Adanya Pandemi Covid-19 yang secara resmi masuk ke Banyuwangi per Maret 2020, membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya kebijakan terkait pajak daerah. Kebijakan ini perlu dikeluarkan agar pajak daerah yang dibebankan kepada masyarakat menjadi lebih ringan, namun demikian tetap bertujuan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Beberapa kebijakan pajak daerah yang dikeluarkan antara lain yaitu pada tanggal 3 April 2020 terdapat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2020 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporan Pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Bawah Tanah, Reklame dan Mineral Bukan Logam dan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Covid-19 Tahun 2020, dimana aturan tersebut berisi sebagai berikut :

1. Menetapkan penghapusan denda sanksi administrasi keterlambatan pelaporan, penghapusan denda sanksi administrasi keterlambatan pelaporan pembayaran pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, air bawah tanah, reklame dan mineral bukan logam dan penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19.
2. Penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 tahun pajak 1994 – 2020 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dalam rangka pemberian stimulus dan relaksasi pajak bagi wajib pajak terdampak wabah Covid-19.
3. Penghapusan Denda Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan sebagai berikut:
   1. Melaksanakan Validasi data Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2);
   2. Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2, elektronik pajak daerah (e-PAD) dan sistem pendapatan daerah (SIMPADA);
   3. Menyusun Laporan Hasil Penghapusan Sanksi Administrasi denda keterlambatan pelaporan dan pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Bawah Tanah, Reklame Dan Mineral Bukan Logam.
4. Meluncurkan aplikasi E-PAD

E-PAD bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, akuntabel dan professional. E-PAD dibangun secara mandiri antara Badan Pendapatan Daerah, BPKAD dan Dinas Kominfo untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan terkait pelayanan perpajakan daerah, khususnya di masa Pandemi Covid-19 untuk menghindari kontak langsung antara wajib pajak dengan aparatur pajak. Bapenda mendapat dukungan dari mitra kerja Pemerintah Daerah yaitu Bank Jatim berupa penanaman server di Diskominfo. Selain itu, aplikasi ini juga telah terintegrasi dengan data perijinan milik DPMPTSP dan data Nomor Induk Kependudukan milik Disdukcapil, dengan tidak menutup kemungkinan berintegrasi dengan *stakeholder* lainnya.

Selain kebijakan di atas, beberapa kebijakan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara lain sebagai berikut:

1. Adanya inovasi pembayaran pajak berbasis online

Inovasi pembayaran pajak berbasis online misalkan diterapkan pada pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pasar. Sehingga dengan adanya inovasi pembayaran online maka akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi yang terutang. Dengan adanya layanan pembayaran pajak dan retribusi retribusi secara online, diharapkan akan mengurangi tingkat kecurangan baik yang dilakukan oleh wajib pajak dan retribusi yang bersangkutan maupun oleh aparatur / petugas pemungut pajak dan retribusi daerah.

1. Menambahkan menu loket pelayanan PBB kepada Desa dan Kelurahan

Sebelum adanya menu ini, desa dan kelurahan dapat melakukan pembayaran secara kolektif warga masyarakatnya melalui aplikasi PBB. Loket Pelayanan ini diberikan untuk memudahkan desa / kelurahan melakukan proses perubahan data subjek pajak yg sebelumnya dilakukan secara manual melalui BAPENDA atau Mall Pelayanan Publik, sekarang wajib Pajak hanya perlu melengkapi Berkas persyaratan di Desa/ Kelurahan.

1. Bapenda bekerja sama dengan Bank Jatim

Kerjasama antara Bapenda dengan Bank Jatim antara lain memberikan penghargaan berupa kulkas kepada 1 Kecamatan dan 6 Desa yang telah melakukan pelunasan PBB 2020 tercepat. Adanya kebijakan ini diharapkan aparatur desa dan kecamatan akan berlomba-lomba agar warga di wilayahnya segera melunasi PBB, sehingga dapat memperoleh hadiah tersebut.

1. Kegiatan penagihan dan pemeriksaan secara rutin

Meskipun adanya Pandemi Covid-19, kegiatan intensifikasi dalam bentuk penagihan dan pemeriksaan pajak tetap berjalan. Bedanya dengan masa normal adalah dengan mengurangi interaksi dengan wajib pajak. Selain itu digunakan metode seperti mengeluarkan surat tagihan 1 sampai dengan surat tagihan 3, jika surat tagihan 3 tetap masih diabaikan oleh wajib pajak, maka Bapenda mengalihkan upaya penagihan bekerjama dengan pihak Kejaksaan.

Berbagai kebijakan pajak daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka merespon Pandemi Covid-19, perlu diketahui efektifisnya dalam rangka penerimaan pajak daerah. Sehingga perlu disandingkan dengan data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah, agar dapat diketahui seberapa jauh efektifitasnya. Untuk mengetahui lebih jelas efektifitas kebijakan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, serta hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah setelah adanya Pandemi Covid-19, berikut disajikan data target dan realisasi PAD untuk tahun 2018-2020 yang mencerminkan sebelum dan sesudah adanya Pandemi Covid-19 :

**Tabel 1. Target dan realisasi PAD**



Berdasarkan Tabel 1. diatas, realisasi penerimaan PAD Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari 450,06 milyar menjadi 495,68 milyar. Meskipun target penerimaan menurun tajam dari yang semula ditargetkan 624,17 milyar namun pada tahun 2019 target PAD turun menjadi 517,57 milyar. Namun demikian hal tersebut tidak menjadi masalah, karena walaupun target menurun, namun realisasi penerimaan PAD meningkat. Permasalahan timbul pada tahun 2020, dimana target PAD meningkat menjadi 565,19 milyar, namun realisasinya menurun menjadi 482,74 milyar. Menurunnya realisasi PAD disebabkan pada tahun 2020 merupakan tahun awal adanya Pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan PAD Kabupaten Banyuwangi menurun. Hal ini dikarenakan adanya pandemi menyebabkan sektor ekonomi dan pariwisata menjadi lesu, sehingga berdampak pada menurunnya PAD.

Lebih lanjut, untuk melihat pengaruh kebijakan pajak daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam merespon adanya pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak daerah, maka pada tahun 2021 diketahui bahwa besaran target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Daerah**



Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa terdapat lima (5) jenis Pajak Daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan PAD, yaitu : Pajak Penerangan Jalan, PBB-P2, BPHTB, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel. Sedangkan berdasarkan objeknya, Penerimaan PAD yang ditunjang dari sektor pariwisata yang memenuhi target, misalkan pajak hotel mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 9,6 milyar atau 133,02 % dari target sebesar Rp 7,2 milyar. Pajak restoran juga memenuhi target penerimaan sebesar 17,5 milyar dari target sebesar Rp 12,7 milyar atau sebesar 137,42 %. Adapula pajak hiburan yang menerima 1,6 milyar dari target 1,3 milyar atau sebesar 124,49 %. Pajak pendukung yang lain adalah pajak parkir yang menerima 823 juta dari target 784 juta atau sebesar 104,96 %.

Pajak daerah yang nilainya signifikan atau termasuk memberi kontribusi terhadap PAD dalam jumlah besar namun tidak memenuhi target antara lain pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2), pajak penerangan jalan (PPJ) dan BPHTB. Pajak penerangan jalan hanya memperoleh Rp 75,7 milyar atau sebesar 98,29 % dari yang ditargetkan. Lebih lanjut, PBB-P2 memperoleh 42,3 milyar atau sebesar 92,70 %. Persentase terkecil adalah BPHTB, dimana pada tahun 2020 diperoleh 38,53 milyar atau hanya sebesar 75,55 % dari target yang ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2020 yang terdampak adanya Pandemi Covid-19 adalah BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Penerangan Jalan.

**SIMPULAN**

Berbagai kebijakan pajak daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada masa Pandemi Covid-19 diperoleh hasil penerimaan pajak daerah dari sektor pariwisata relatif stabil. Hal ini dibuktikan walaupun dengan adanya Pandemi Covid-19, namun pajak daerah yang berasal dari sektor pariwisata seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir tetap mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Penetapan target telah dilakukan secara cermat berdasarkan kondisi dan potensi yang ada. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan sektor pariwisata serta didukung letak yang strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Bali, sehingga Kabupaten Banyuwangi dapat memaksimalkan potensi pajak daerah dari sektor pariwisata. Walaupun hasil akhir penerimaan pajak daerah di masa pandemi ini tidak optimal sebagaimana pada saat era normal sebelum adanya pandemi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asmandani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., & Kusumaningrum, N. D. (2020). Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java: Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java. *Jurnal Mantik*, *3*(4), 619-625. Retrieved from http://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/637

Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S., Kusumaningrum, N., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, *4*(1), 9 - 20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>

Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Nur Jannah. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Perpajakan* (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2020). *Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2020 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporan Pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Bawah Tanah, Reklame dan Mineral Bukan Logam dan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Covid-19 Tahun 2020*.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2020). *Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyuwangi*.

Pradiska, K dan Prayudi, M. (2021) Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Terkait Pemungutan PBB-P2 Pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol : 12 No : 03 Tahun 2021 e- ISSN: 2614 – 1930.

Puspita, Y., & Wicaksono, G. (2020, March 8). *Potential Analysis And Optimalize Strategy Of Boarding Home Tax In Banyuwangi District*. https://doi.org/10.31227/osf.io/r7fa2

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat

Susilo, D., Hidayat, R., Pamungkas, T. S., Wicaksono, G., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2018). Total Quality Management On One-Stop Integrated Licensing Service In Indonesia: A Study Of Two Regional Governments In East Java. Int J Recent Sci Res. 9(12), pp.89-96.30122-30126

Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN BANYUWANGI. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, *5*(1), 135 - 150. Retrieved from <http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/372>

Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2020). The Role of Working Capital on Profitability After Tax on Automotive And Allied Products Companies in Indonesia: The Role of Working Capital on Profitability After Tax on Automotive And Allied Products Companies in Indonesia. *Jurnal Mantik*, *3*(4), 588-596. Retrieved from http://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/633

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LP2M Universitas Jember yang telah memfasilitas jalannya penelitian ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.